



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

Alamat : Jln. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : SK / 01 /V.09/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 Nomor : SK / 01 /V.09/2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	<p>Makna Indikator : Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui tingkat implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung</p> <p>Rumus Perhitungan : Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Jumlah Anggaran Belanja Langsung Provinsi</p>	Laporan data anggaran responsive gender Dinas PPPA Provinsi Lampung	0,79	0,8	2,82	3	3,1	3,2
2.	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	%	<p>Makna Indikator : Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui sejauh mana Pemenuhan hak dan Perlindungan anak di Provinsi Lampung Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. 	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	40	53,33	86,67	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
				<p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Peraturan/Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Tersedia SDM terlatih KHA, Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kegiatan Inovatif</p>							
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	%	<p>Makna Indikator : Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak secara menyeluruh (Pengaduan, Medis, Pendampingan, Psikologi, dan Rumah Aman)</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung</p> <p>Rumus Perhitungan : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan penanganan komprehensif dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dikali 100</p>	UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Lampung	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	%	<p>Makna Indikator : cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur</p> <p>Alasan pemilihan : Untuk mengetahui jumlah pasangan usia subur yang Ber KB</p> <p>Rumus Perhitungan : Jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100</p>	BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung	14,05	15,9	66,88	67,29	67,71	68,28

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS,

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001